

**PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN, JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN LHP BPK, DAN  
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH PADA OPINI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021-2023**

Jamaludin Iskak<sup>1)</sup>, Muhammad Gilang Permata Ardinanto<sup>2)</sup>  
Program Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Tarumanagara, Jakarta

| Correspondence                                                                  |                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Email: <a href="mailto:permataardianto@gmail.com">permataardianto@gmail.com</a> | No. Telp: -              |                           |
| Submitted: 28 Desember 2024                                                     | Accepted: 3 Januari 2025 | Published: 4 Januari 2025 |

**ABSTRACT**

*This study seeks to examine the impact of the completion rate of follow-up on audit findings, the number of audit findings from BPK (Audit Board of Indonesia), and the characteristics of local governments on the audit opinion of local government financial reports in South Sulawesi Province for the fiscal years 2021–2023. The population consists of all districts/cities in South Sulawesi Province, with samples determined using census sampling techniques. This study utilises secondary data obtained from BPK's audit reports. The analysis method employed is logistic regression analysis. The findings reveal that the follow-up completion rate, number of audit findings, and local government characteristics, including PAD, expenses, age, and assets, do not significantly influence the audit opinion. These results indicate that audit opinions are influenced more by compliance with financial reporting standards and effective internal control systems rather than by fiscal capacity or managerial experience alone.*

**Keywords:** *Audit Findings, Follow-up Completion Rate, Local Government Characteristics, Audit Opinion.*

## 1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai instrumen penting untuk mencerminkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa LKPD sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menerbitkan opini audit, yang dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), ataupun Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan kualitas tata kelola keuangan di daerah. Namun, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 menunjukkan bahwa rekomendasi BPK banyak yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah, mengindikasikan kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai salah satu provinsi yang tengah berkembang di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa daerah di provinsi ini masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan mempertimbangkan temuan audit dari BPK sebagai dasar.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, penilaian BPK dipengaruhi oleh kriteria yang meliputi luasnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, kuantitas temuan hasil pemeriksaan, dan atribut pemerintah daerah yang meliputi kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Sistem pengendalian internal yang belum memadai, keterbatasan kemampuan anggaran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan hambatan dalam mencapai tata kelola keuangan yang memadai serta transparan.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah merespons hasil temuan proses pemeriksaan. BPK memberikan berbagai rekomendasi kepada entitas yang diperiksa dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, memitigasi potensi kerugian negara, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini yang ditetapkan oleh BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut, maka semakin besar peluang pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP yang merupakan opini tertinggi sebagai cerminan kepatuhan serta akuntabilitas yang optimal.

Mengacu pada temuan ini, pemerintah daerah harus mengimplementasikan tindakan-tindakan perbaikan, seperti meningkatkan mekanisme pengendalian internal, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rekomendasi audit BPK, hingga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang ketat. Diharapkan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka sehingga dapat memperoleh opini WTP dari BPK dengan menerapkan prosedur-prosedur tersebut.

Penelitian ini mengkaji pengaruh jumlah hasil pemeriksaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil tersebut, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap penilaian LKPD di Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021–2023.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah ukuran sejauh mana rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa eksternal (seperti BPK) telah dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa. Tindak lanjut ini merupakan indikator penting atas tanggung jawab organisasi dalam menangani temuan-temuan yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal kepatuhan dan efektivitas pengelolaan sumber daya (Mardiasmo, 2018).

Sejauh mana tindak lanjut hasil audit diselesaikan menunjukkan komitmen entitas dalam melaksanakan rekomendasi auditor dan menangani temuan-temuan audit. Tingkat penyelesaian tindak lanjut ini mencerminkan kemampuan manajerial serta komitmen terhadap peningkatan tata kelola (Arens, Elder, dan Beasley; 2017).

Sedangkan, menurut Bastian (2019), tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan guna memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian dan efisiensi pengelolaan keuangan. Tingkat penyelesaian ini menjadi tolak ukur yang signifikan dalam mengukur efektivitas pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntabilitas di sektor publik.

Jadi, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah ukuran keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab entitas dalam melaksanakan rekomendasi audit untuk memperbaiki kelemahan tata kelola dan pengendalian internal, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

### Jumlah Temuan Pemeriksaan

Jumlah temuan pemeriksaan adalah jumlah kelemahan, kekurangan, atau pelanggaran yang ditemukan oleh BPK, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal, pada pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan sistem pengelolaan keuangan di entitas yang diperiksa, khususnya di lingkup pemerintah daerah. Temuan pemeriksaan ini mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan sistem pengendalian internal,

serta penggunaan sumber daya yang tidak efektif atau tidak efisien. Jumlah temuan pemeriksaan dapat memberikan gambaran sejauh mana entitas tersebut memenuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangannya.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2017), temuan pemeriksaan adalah segala bentuk penyimpangan yang ditemukan oleh auditor dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap aturan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, atau kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi opini audit yang akan diberikan. Sementara itu, Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan menggambarkan tingkat risiko dan kelemahan tata kelola keuangan di suatu entitas, yang harus segera diperbaiki untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik dapat diterapkan.

Jadi, jumlah temuan pemeriksaan adalah jumlah kelemahan atau pelanggaran yang ditemukan auditor dalam audit keuangan, mencakup ketidakpatuhan, kelemahan pengendalian internal, dan ketidakefisienan yang mencerminkan tingkat risiko serta kelemahan tata kelola entitas.

### **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Karakteristik Pemerintah Daerah adalah serangkaian atribut atau ciri-ciri unik yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, administrasi, dan kelembagaan di wilayah tersebut. Kapasitas fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, struktur organisasi, dan mutu sumber daya manusia pemerintah daerah adalah beberapa contoh atribut tersebut. Karakteristik-karakteristik ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan, tata kelola, dan pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas layanan publik yang diberikan.

Menurut Mardiasmo (2018), karakteristik pemerintah daerah mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dan memberikan layanan publik, seperti ukuran wilayah, kapasitas fiskal, dan kompetensi sumber daya manusia.

Mahmudi (2019) menyebutkan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah atribut yang mencerminkan kemampuan manajerial dan administrasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada tata kelola dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Bastian (2019), karakteristik pemerintah daerah adalah segala atribut yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Jadi, karakteristik pemerintah daerah adalah serangkaian atribut yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, administrasi, dan kelembagaan suatu wilayah, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, tata kelola, dan kualitas layanan publik.

### **Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

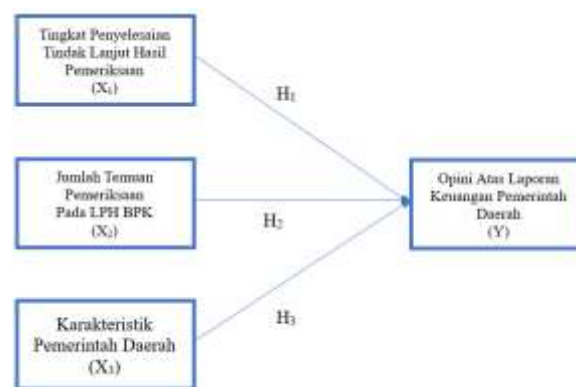
Opini ini merupakan pernyataan profesional yang diterbitkan oleh BPK, terkait kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan suatu pemerintah daerah berdasarkan SAP. Opini ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyajian laporan keuangan, serta efektivitas pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Perspektif yang diungkapkan menggambarkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel di lingkungan pmda sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dapat ditunjukkan dari opini yang disampaikan.

Menurut Mardiasmo (2018), penilaian yang bertujuan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi peraturan akuntansi yang relevan serta tidak terdapat kesalahan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna menjadi dasar simpulan auditor. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2017), opini audit merupakan penilaian yang tidak

memihak oleh auditor mengenai kewajaran serta tidak adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan, serta berfungsi sebagai sarana akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Indra Bastian (2019) menambahkan bahwa opini audit atas laporan keuangan merupakan tolak ukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan seberapa baik tata kelola dan kontrol internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Penilaian profesional auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan, sejalan dengan aturan serta standar akuntansi yang relevan, sebagai bentuk opini atas LKPD. Opini ini berfungsi sebagai sarana akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan mencerminkan tingkat manajemen, akuntabilitas, dan pengendalian internal pemerintah daerah.

### Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



**Gambar 2.1**

#### Kerangka Pemikiran

Merujuk pada kerangka konseptual ini, hipotesis penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H<sub>2</sub>: Jumlah Temuan Pemeriksaan Pada LPH BPK berpengaruh terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H<sub>3</sub>: Karakteristik Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 3. Metode Penelitian

#### Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif asosiatif untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan keterkaitan antar variabel yang dapat diukur secara objektif dan kuantitatif. Untuk menyelidiki secara menyeluruh pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel-variabel dependen, penelitian kuantitatif asosiatif melihat interaksi antar variabel, termasuk hubungan linear, korelasional, dan kausal. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif bertujuan untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen dapat memengaruhi variabel-variabel dependen dan memastikan tingkat korelasi di antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini melihat jumlah temuan audit, karakteristik pemerintah daerah, serta variabel independen tingkat penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Opini atas LKPD merupakan variabel dependen yang diteliti.

## Operasionalisasi Variabel

### Variabel Dependen (Y)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), yang menggambarkan penilaian profesional auditor terkait keakuratan informasi laporan keuangan, sebagai variabel dependen penelitian ini, diukur secara biner dengan kategori 1 = WTP dan 0 = Selain WTP (WDP, TW, TMP).

### Variabel Independen (X)

#### Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X1)

Variabel independen pertama yaitu Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X1), yang dihitung dengan mempergunakan rumus Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi ÷ Total Rekomendasi × 100 serta mewakili persentase tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah diselesaikan.

#### Jumlah Temuan Pemeriksaan (X2)

Jumlah Temuan Pemeriksaan (X2), variabel independen kedua dalam penelitian ini, ditentukan dengan menjumlahkan seluruh temuan pemeriksaan dari tahun anggaran yang bersangkutan yang dilaporkan dalam LHP BPK.

#### Karakteristik Pemerintah Daerah (X3)

Selanjutnya, variabel independen ketiga pada penelitian ini yaitu Karakteristik Pemerintah Daerah (X3) terdiri dari empat indikator: WEALTH (realisasi Pendapatan Asli Daerah), EXPENSE (realisasi belanja daerah), AGE (umur pemerintah daerah), dan ASSET (total aset daerah).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif

Tujuan dari analisis univariat ialah untuk memberikan ringkasan karakteristik data dari setiap variabel yang diterapkan dalam kajian ini, meliputi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah Temuan Pemeriksaan LHP BPK, Karakteristik Pemerintah Daerah (WEALTH, EXPENSE, AGE, ASSET), dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data, yaitu median, rerata, serta standar deviasi, nilai maksimum, hingga minimum, sehingga memberikan pemahaman awal tentang pola data pada setiap variabel.

### Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Analisis Deskriptif**

| Descriptive Statistics |    |                   |                    |                   |                   |
|------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                        | N  | Minimum           | Maximum            | Mean              | Std. Deviation    |
| TLHP (X1)              | 75 | 67.01%            | 96.60%             | 79.4347%          | 7.12670%          |
| JTP (X2)               | 75 | 5                 | 60                 | 21.32             | 11.912            |
| WEALTH (X3.1)          | 75 | 46.186.064.288    | 8.183.900.557.070  | 204.461.986.929   | 842.978.669.767   |
| EXPENSE (X3.2)         | 75 | 881.422.316.833   | 10.567.278.257.981 | 1.724.015.444.878 | 1.704.002.176.818 |
| AGE (X3.3)             | 75 | 13.0              | 769.0              | 296.720           | 291.6574          |
| ASSET (X3.4)           | 75 | 1.516.684.157.863 | 33.314.356.244.919 | 4.823.632.363.451 | 6.559.000.204.137 |
| OPINI (Y)              | 75 | 0                 | 1                  | .81               | .291              |

Sumber: Olahan Data (2024)

**Uji Goodness of Fit**

**Tabel 4.2**  
**Uji Goodness of Fit**

| Hosmer and Lemeshow Test |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Step                     | Chi-square | df | Sig. |
| 1                        | 2.653      | 7  | .915 |

Nilai Chi-square adalah 2,653, dengan 7 derajat kebebasan dan nilai signifikansi 0,915. Nilai signifikansi menunjukkan melebihi 0,05 yang mengindikasikan model regresi logistik menunjukkan kesesuaian yang memuaskan dengan data penelitian. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan substansial antara nilai yang diperkirakan oleh model dan nilai yang tercatat dalam data. Ini mengindikasikan model regresi logistik yang dipergunakan sangat efektif dalam memprediksi hubungan antara: variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel Matriks Klasifikasi**

**Tabel 4.3**  
**Matriks Klasifikasi**

| Classification Table <sup>a</sup> |           |           |     |                    |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------|--|
| Observed                          |           | Predicted |     |                    |  |
|                                   |           | OPINI (Y) |     | Percentage Correct |  |
| Step 1                            | OPINI (Y) | WDP       | WTP |                    |  |
|                                   |           | 0         | 5   | .0                 |  |
|                                   | WTP       | 0         | 70  | 100.0              |  |
| Overall Percentage                |           |           |     | 93.3               |  |

a. The cut value is .500

Dari tabel di atas, model regresi logistik berhasil memprediksi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat akurasi 100% (70 dari 70 data observasi WTP diprediksi benar). Namun, model gagal memprediksi opini Selain WTP (WDP) dengan benar, karena semua data observasi WDP (5 data) diprediksi sebagai WTP, menghasilkan tingkat akurasi 0% untuk WDP. Secara keseluruhan, model memiliki tingkat akurasi klasifikasi sebesar 93.3%, yang berarti model mampu memprediksi 93.3% dari total data dengan benar.

**Analisis Regresi Logistik**

**Tabel 4.4**  
**Analisis Regresi Logistik**

| Variables in the Equation |         |        |       |    |      |            |
|---------------------------|---------|--------|-------|----|------|------------|
|                           | B       | S.E.   | Wald  | df | Sig. | Exp(B)     |
| TLHP (X1)                 | 13.658  | 10.319 | 1.752 | 1  | .186 | 853800.579 |
| JTP (X2)                  | -.039   | .056   | .494  | 1  | .482 | .961       |
| WEALTH (X3.1)             | .458    | 1.516  | .089  | 1  | .765 | 1.582      |
| EXPENSE (X3.2)            | 1.697   | 3.707  | .210  | 1  | .647 | 5.457      |
| AGE (X3.3)                | .087    | .454   | .037  | 1  | .847 | 1.091      |
| ASSET (X3.4)              | .904    | 1.270  | .506  | 1  | .477 | 2.469      |
| Constant                  | -92.427 | 85.938 | 1.157 | 1  | .282 | .000       |

a. Variable(s) entered on step 1: TLHP (X1), JTP (X2), WEALTH (X3.1), EXPENSE (X3.2), AGE (X3.3), ASSET (X3.4).

Persamaan regresi logistik diturunkan sebagai berikut dari tabel yang diberikan:

$$Y = -92.427 + 13.658TLHP + -0.039JTP + 0.458WEALTH + 1.697EXPENSE + 0.087AGE + 0.904ASSET$$



## Pembahasan

### Pengaruh Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Opini atas LKPD di Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis awal yang berlandaskan latar belakang penelitian yang mengemukakan tingkat penyelesaian tindak lanjut merupakan metrik penting untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan dan probabilitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Mardiasmo (2018) dan Arens, Elder, & Beasley (2017), tindak lanjut hasil audit menunjukkan tanggung jawab dan komitmen organisasi dalam mengatasi kekurangan tata kelola keuangan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Amyulianty dkk. (2020), diketahui yaitu tindak lanjut hasil audit berdampak signifikan dan positif atas opini audit.

Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan simpulan Valentina (2022) yang pada penelitiannya menghasilkan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak selalu berdampak signifikan bagi opini audit, terutama jika tindak lanjut tersebut hanya bersifat prosedural dan mengabaikan permasalahan mendasar dari temuan hasil audit. Ini mengindikasikan meskipun tingkat penyelesaian tindak lanjut dapat meningkatkan persepsi akuntabilitas, keberhasilannya tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam opini yang lebih baik, karena opini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jumlah temuan pemeriksaan dan karakteristik pemerintah daerah.

Temuan ini menyiratkan implikasi penting bagi pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya memenuhi rekomendasi secara administratif tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola keuangan. Dengan demikian, tingkat penyelesaian tindak lanjut harus didukung juga dengan upaya penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas SDM sebagai upaya untuk tercapainya opini atas LKPD dengan predikat WTP secara konsisten.

### Pengaruh Jumlah Temuan Pemeriksaan Pada LHP BPK Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kuantitas temuan pemeriksaan yang tertuang dalam LHP BPK tidak berdampak signifikan pada opini LKPD dari hasil pemeriksaan oleh BPK di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini bertentangan dengan asumsi awal yang didasarkan pada latar belakang penelitian, di mana jumlah temuan pemeriksaan dianggap sebagai indikator penting dalam mencerminkan tingkat kepatuhan dan kelemahan sistem pengendalian internal yang dapat memengaruhi opini BPK. Arens, Elder, & Beasley (2017) menjelaskan bahwa temuan pemeriksaan, khususnya yang terkait dengan ketidakpatuhan atau kelemahan pengendalian internal, dapat memberikan dampak langsung terhadap opini audit jika temuan tersebut dianggap material.

Kendati demikian, temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuni dkk. (2023) ini menggambarkan bahwa tidak semua temuan audit berdampak secara langsung atas opini hasil audit, terutama apabila temuan tersebut tidak material atau telah cukup ditangani oleh pemerintah daerah. Penelitian terpisah oleh Valentina (2022) menunjukkan bahwa kuantitas temuan tidak secara konsisten menentukan opini audit, karena opini tersebut lebih dipengaruhi secara signifikan oleh substansi temuan, terutama pelanggaran material yang secara substansial memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah temuan pemeriksaan memberikan gambaran umum tentang tata kelola keuangan daerah, keberadaannya saja tidak cukup untuk memengaruhi opini BPK. Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada

pengurangan jumlah temuan tetapi juga pada penyelesaian temuan-temuan yang bersifat material dan strategis. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan internal serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang relevan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperoleh opini WTP.

### **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Temuan ini mengindikasikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh atribut pemda yang diukur dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, umur pemerintah daerah, hingga jumlah aset daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun karakteristik pemerintah daerah mencerminkan kapasitas fiskal, skala ekonomi, dan pengalaman manajerial, faktor-faktor ini tidak secara langsung menentukan kualitas laporan keuangan yang diukur melalui opini BPK. Dalam latar belakang penelitian, disebutkan bahwa disparitas karakteristik antar daerah sering kali menjadi tantangan dalam mencapai kualitas tata kelola keuangan yang merata, namun hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik tersebut tidak menjadi penentu utama dalam memperoleh opini WTP.

Mardiasmo (2018), menyebutkan bahwa karakteristik seperti PAD dan total aset bias mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola keuangan, khususnya pendapatan, namun kualitas laporan keuangan pemerintah cenderung lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan efektivitas pengendalian internal. Penelitian sebelumnya oleh Rumihin et al. (2021) ditemukan bahwa kualitas pemerintah daerah hanya berdampak signifikan terhadap opini bergantung pada tata kelola yang efektif, bukan sekadar jumlah pendapatan atau aset yang besar. Sebaliknya, Valentina (2022) menunjukkan bahwa opini WTP lebih terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan dengan indikator karakteristik pemda.

Temuan ini mengindikasikan pemerintah daerah tidak dapat semata-mata bergantung pada karakteristik seperti PAD, belanja, usia, atau aset untuk meningkatkan opini laporan keuangan. Sebaliknya, fokus harus diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan penyelesaian temuan audit yang signifikan. Dengan demikian, meskipun karakteristik pemerintah daerah mencerminkan kapasitas dan pengalaman, kualitas laporan keuangan cenderung bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan peraturan serta ketentuan yang relevan dan memadai, akuntabel, sekaligus transparan.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

Simpulan yang diperoleh dari temuan-temuan penelitian ini:

- a) Di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Temuan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah temuan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
- c) Karakteristik pemerintah daerah yang meliputi realisasi PAD, belanja daerah, demografi daerah, dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap opini atas LKPD di Provinsi Sulawesi Selatan.



### Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan penelitian ini meliputi:

- a) Penelitian ini hanya mempergunakan data sekunder dari LHP BPK dan dokumen lain yang sudah tersedia, sehingga tidak mencakup data primer yang dapat memberikan konteks lebih dalam atau pandangan langsung dari pemerintah daerah terkait.
- b) Penelitian ini terbatas pada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian hasil penelitian mungkin tidak dapat menggambarkan secara akurat kondisi pemerintah daerah di daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola yang berbeda.
- c) Penelitian ini hanya memasukkan tiga variabel utama, yaitu tingkat penyelesaian tindak lanjut, jumlah temuan pemeriksaan, dan karakteristik pemerintah daerah. Faktor lain yang mungkin memengaruhi opini laporan keuangan, seperti kualitas sumber daya khususnya sumber daya manusia serta teknologi informasi. Lebih lanjut, penelitian ini tidak menganalisis budaya organisasi.

### Saran

Sejumlah saran berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan berkenaan dengan temuan penelitian serta pembahasan:

- a) Penelitian tambahan dapat mencakup variabel terkait tambahan, seperti efektivitas pengawasan internal dan kualitas manajemen aset, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang unsur-unsur yang memengaruhi opini atas LKPD.
- b) Penelitian akademis dapat dilakukan dengan membandingkan daerah-daerah dengan karakteristik fiskal, tata kelola, dan tingkat kepatuhan yang berbeda untuk memahami bagaimana konteks daerah memengaruhi opini audit
- c) Para akademisi dapat mengembangkan model statistik yang lebih kompleks, seperti analisis jalur atau *structural equation modeling* (SEM), untuk mengeksplorasi korelasi tidak langsung antara variabel karakteristik daerah, temuan audit, dan opini laporan keuangan.

### Referensi

- Amyulianty, R., et al. (2020). *Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)*. Jurnal Penelitian Akuntansi, 1(1), 14 – 27.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach (16th ed.)*. Pearson.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rumihin, R., et al. (2021). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018*. Jurnal Akuntansi, 1 – 13.
- Salsabila, R., Wahyudi, I. (2022). *Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(1), 38 – 45.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

- Valentina, J. (2022). *Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Syntax Idea, 4(6), 951 – 970.
- Wahyuni, M. A., et al. (2023). *Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Atas LKPD Kota/Kabupaten di Sumatera Utara TA 2020*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 3(6), 1289 – 1301.